

## RINGKASAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian ini mengambil judul: “Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Fakultas Ilmu Budaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan Fakultas Ilmu Budaya sebagai Unit Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman tahun anggaran 2017 serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Unit Fakultas Ilmu Budaya pada proses penyusunan laporan keuangan dan menemukan solusi yang dapat dikembangkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa: (1) Laporan keuangan Unit Fakultas Ilmu Budaya tahun 2017 belum menggunakan acuan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; (2) Kendala-kendala yang dihadapi Unit Fakultas Ilmu Budaya pada proses penyusunan laporan keuangan adalah (a) Belum tersistemisasi penyusunan laporan keuangan di Unit; (b) Belum memadainya jumlah SDM yang menguasai tentang penyusunan laporan keuangan; dan (c) Kesulitan mapping akun dari format SAK ke SAP. Solusi yang telah dikembangkan untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut yaitu (a) Menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 pada laporan keuangan tahun 2018; (b) Memiliki template untuk setiap transaksi-transaksi yang ada di Unsoed; (c) Mengadakan workshop; (d) Mereviu laporan keuangan; dan (e) Pelaporan keuangan dilakukan dengan tepat waktu.

Implikasi dari kesimpulan diatas yaitu penyusunan laporan keuangan pada Unit BLU Unsoed hendaknya mulai menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 sebagai acuannya di setiap periode akuntansi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada unit-unit beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016. Akibat adanya perubahan-perubahan tersebut, maka diperlukan pelatihan-pelatihan untuk unit dari pihak Satker pusat (Universitas) agar pihak unit dapat memahami PMK No.220 secara mendalam.

**Kata kunci:** *Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Keuangan, Laporan Keuangan.*

## **SUMMARY**

*This research is a qualitative research at the Humanities Faculty, Jenderal Soedirman University. The title of this research is "Application of the Ministerial Regulation of Finance Number 220/PMK.05/2016 about Accounting Systems and Financial Reporting of Badan Layanan Umum at the Humanities Faculty ". The purpose of this research is to find out how the presentation of the Humanities Faculty's financial statements as a Badan Layanan Umum Unit of the Jenderal Soedirman University of 2017 and to identify the obstacles faced by the Humanities Faculty in the process of preparing financial statements and find solutions that can be developed.*

*Based on the results of this research, it is known that: (1) The financial statements of the Humanities Faculty of 2017 have not used the Ministerial Regulation of Finance Number 220/PMK.05/2016 about Accounting Systems and Financial Reporting of Badan Layanan Umum; (2) The obstacles faced by the Humanities Faculty Unit in the process of preparing financial statement are (a) Un-systemized preparation of financial statements in the Unit; (b) Inadequate number of HR masters about the preparation of financial statements; and (c) Difficulty mapping the account from SAK format to SAP. The solutions that have been developed to minimize these obstacles are (a) Implementing the Ministerial Regulation of Finance Number 220/PMK.05/2016 in the financial statements of 2018; (b) Have a template for every transaction in Unsoed; (c) Hold workshop; (d) Reviewing financial statements; and (e) Reporting the financial statement is timely.*

*The implication of the above conclusion is that the preparation of financial statemnet at Unit of Unsoed BLU should begin to implement the Ministerial Regulation of Finance Number 220/PMK.05/2016 as a reference in each accounting period. In order to providing convenience to the units adapting with the changes that exist in the Ministerial Regulation of Finance Numbe 76/PMK.05/2008 become the Ministerial Regulation of Finance Number 220/PMK.05/2016. As a result of these changes, training for units from the central Satker (the University) is needed, so that the unit can understand PMK No.220 in depth.*

**Keywords:** *Badan Layanan Umum, the Ministerial Regulation of Finance, financial statement.*